

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada era globalisasi saat ini di dilihat dari sudut pandang pemerintahan, peranan teknologi informasi dan sistem informasi yang handal tidak lagi diragukan dalam meningkatkan kemampuan unit pemerintahan mewujudkan akuntabilitas suatu pemerintahan. Di samping itu masalah-masalah yang timbul semakin kompleks, sehingga akan menjadi lebih sulit bagi pimpinan untuk mengambil keputusan yang tepat, apabila informasi yang tersedia tidak menunjukkan keadaan yang sebenarnya dan tidak memberikan informasi sesuai dengan yang dibutuhkan. Apabila informasi yang tersedia tidak menunjukkan keadaan yang sebenarnya pimpinan akan dihadapkan dengan masalah-masalah, seperti: memimpin, mengendalikan dan pengambilan keputusan.

Pimpinan dalam perencanaan pengambilan keputusan sangat membutuhkan informasi-informasi yang akurat, guna menghasilkan keputusan yang tepat dan bermanfaat bagi pemerintahan. Salah satu informasi yang dibutuhkan pimpinan adalah informasi mengenai keuangan yang tertuang melalui laporan keuangan yang dihasilkan oleh sistem informasi akuntansi. Oleh sebab itu penting bagi pemerintah memiliki akses kepada informasi akuntansi yang baik, agar mendukung dalam pengambilan keputusan yang tepat. Penggunaan sistem informasi tersebut diharapkan mampu mendorong kegiatan operasional secara efektif, efisien dan terkendali. Efektivitas, efisiensi

dan pengendalian tersebut dapat terwujud melalui penggunaan informasi yang akurat yang dihasilkan dari suatu sistem informasi yang handal.

Sistem informasi akuntansi adalah sistem yang mengumpulkan, mencatat dan memproses data untuk menghasilkan informasi dalam pengambilan keputusan (Romney dan Steinbart, 2006). Aktivitas dari sistem informasi akuntansi yaitu mengumpulkan, mencatat, memproses informasi keuangan sehingga dapat memudahkan dalam pengambilan keputusan bagi pihak eksternal dan pihak internal. Sistem informasi akuntansi dirancang tidak hanya untuk mendokumentasikan (mencatat, mengklasifikasikan, meringkas dan melaporkan) hasil aktivitas atau peristiwa ekonomi dengan berbagai organisasi yang terkait untuk kepentingan internal dan eksternal organisasi, akan tetapi juga berfungsi sebagai pedoman serta pengendali terhadap bagaimana pendokumentasian tersebut harus dilakukan oleh suatu organisasi (Susanto, 2017:64).

Konsep Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah sejalan dengan konsep sistem akuntansi yang telah dijelaskan sebelumnya dan Sistem Akuntansi Keuangan dalam SAP. Hal ini tertulis dalam Pasal 1 ayat (11) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP yang menyebutkan bahwa Sistem Akuntansi Pemerintahan adalah rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan pemerintahan. Oleh karena itu, Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah adalah rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggaraan, peralatan, dan elemen lain

untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan pemerintah daerah.

Pemerintah adalah kelompok orang-orang tertentu yang secara baik dan benar serta indah melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dalam mengoordinasikan, memimpin dan menghubungkan antara dirinya dengan masyarakat, antara departemen dan unit dalam tubuh pemerintah itu sendiri (Syafiie, 2016:12). Pemerintah adalah orang yang mengelolah dan memproses keuangan baik itu penerimaan maupun pengeluaran kas yang tidak lepas dari penggunaan sistem informasi akuntansi.

Reformasi dibidang keuangan pemerintah menuntut peningkatan kinerja tata kelola keuangan daerah yang akuntabel dan transparansi, sebagai indikatornya adalah ketercapaian *good governance* serta kriterianya adalah ketepatan dan keakuratan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah. Menurut Ferryono dan Sutaryo (2017:143) Perkembangan akuntansi di sektor publik berjalan sangat lambat. Ditandai pada tahun 2004 Indonesia masih menggunakan sistem pencatatan *single-entry*. Sistem *double-entry* baru diterapkan pada tahun 2005 seiring dengan terbitnya paket Undang-undang Keuangan Negara (UUKN) yaitu UU No 17 tahun 2003, UU No 1 tahun 2004, dan UU No 15 tahun 2004 dan PP 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis kas menuju akrual. Laporan keuangan pokok menurut PP 24 Tahun 2005 setidaknya meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, Catatan atas Laporan Keuangan (selanjutnya disebut CaLK). Selain empat Laporan Keuangan Pokok tersebut, terdapat dua

laporan lainnya yaitu Laporan Kinerja Keuangan dan Laporan Ekuitas.

Sedangkan penelitian yang dilakukan Ripley dkk dalam Hifni (2017) melihat perkembangan sistem informasi akuntansi di dalam *Organization for Economic Co- operation and Deploiment* sudah berkembang luas. Dilihat dengan data yang dikumpulkan mulai dari tahun 2015 sampai 2016 sekitar 1/3 dari negara yang tergabung didalam OECD telah mengadopsi akuntansi berbasis akrual. Mereka melihat akuntansi berbasis akrual ini memiliki potensi untuk memperbaiki kualitas dalam penyajian laporan keuangan pemerintah.

Berdasarkan penelitian diatas perkembangan akuntansi sektor publik di Indonesia sedikit kalah cepat dibandingkan negara-negara yang tergabung dalam *Organization for Economic Co- operation and Deploiment*. Menurut negara yang telah mengadopsi akuntansi berbasis akrual, khususnya negara yang tergabung di OECD penerapan akuntansi berbasis akrual dimaksudkan untuk memperbaiki kualitas penyajian laporan keuangan pemerintah. Oleh karena itu dalam meningkatkan kinerja tata kelola keuangan daerah yang akuntabel dan transparan, pemerintah dapat menerapkan secara efektif sistem akuntansi berbasis akrual. Menurut PP No. 71 (2010) akuntansi Basis akrual adalah pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi, walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau oleh entitas pelaporan. dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi, walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau entitas pelaporan.

Uyar dkk (2017 : 10) mengemukakan bahwa berfungsinya sistem informasi akuntansi sangat penting untuk meningkatkan tata kelola dalam sebuah organisasi. Zurianti dkk (2017) melakukan penelitian tentang *A Survey on the Impact of Accounting Information System on Tasks Efficiency: Evidence from Malaysian Public Sector Agencies*, dikemukakan bahwa efektivitas sistem informasi akuntansi berdampak pada efisien tugas secara umum, seperti tugas penganggaran, akuntansi dan pelaporan, audit dan pengendalian. Serta temuan dalam penelitiannya didukung oleh penelitian lainnya yang dilakukan oleh Salehi dan Sajady (2010) penggunaan sistem informasi akuntansi menyebabkan peningkatan kualitas laporan keuangan, pengendalian internal yang efektif dan komunikasi informasi keuangan. Ditkaew (2013) Mengemukakan bahwa sistem informasi akuntansi yang berkualitas berhubungan positif dengan efektivitas pengendalian intern yang handal dan pengambilan keputusan. Selain itu, efektivitas pengendalian intern dan dapat diandalkan dalam pengambilan keputusan juga memiliki efek positif pada kinerja perusahaan.

Oleh karena itu, Sistem informasi keuangan di pemerintahan harus menuntut sistem informasi yang lebih baik agar mendukung informasi yang akurat di dalam laporan keuangan. Laporan keuangan di gunakan sebagai dasar pengambilan keputusan, maka laporan keuangan pemerintahan harus disajikan secara andal dan relevan. Untuk menghasilkan laporan keuangan yang baik, maka pemerintah daerah perlu memiliki sistem akuntansi berdasarkan peraturan pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010, tentang standar akuntansi

pemerintahan, peraturan pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2005, tentang pengelolaan keuangan daerah serta permendagri Nomor 21 Tahun 2011, tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah yang di sempurnakan dengan permendagri Nomor 24 Tahun 2013 tentang Penerapan satandar akuntansi berbasis akrual pada pemerintahan daerah. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bertujuan umum untuk memenuhi kebutuhan informasi dari semua kelompok pengguna.

Konthong dan Shutimarrungson (2014) melakukan penelitian tentang *Effects Of It Roles Of Accounting Executives On Accounting Information System Control Performance*, dikemukakan bahwa peran sistem informasi akuntansi moderen berdampak positif pada kinerja pengendalian sistem informasi akuntansi dan juga berdampak positif terhadap kinerja perusahaan. Selain itu, kinerja kontrol sistem informasi akuntansi berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. Harash, dkk (2014) mengemukakan bahwa UKM yang memperoleh sistem informasi akuntasi secara luas dapat meningkatkan sumber daya yang mampu menciptakan keunggulan kompetitif. Daoud dan Triki (2013) mengatakan bahwa keterlibatan manajemen puncak dan keahlian eksternal berdampak pada sistem informasi akuntansi. Selain itu, mereka menunjukkan bahwa teknik akuntansi yang digunakan setelah mengadopsi sistem *Enterprise Resource Planning* (ERP) mempengaruhi kinerja perusahaan.

Pemerintah Daerah hendaknya sudah mulai memikirkan investasi untuk pengembangan sistem informasi akuntansi yang diterapkan sekarang ini. Pemerintah dapat mencoba sistem keuangan moderen yang dapat

meningkatkan sumberdaya serta menghemat waktu pengerjaan tugas-tugas operasional. Sistem keuangan moderen akan berdampak pada kinerja pengendalian sistem informasi akuntansi, sehingga informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi keuangan dapat diandalkan. Sistem keuangan moderen yang digunakan dapat membantu meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pemerintahan.

Dewi dkk (2015) melakukan penelitian tentang peningkatan kinerja pemerintah daerah di kabupaten Bangli. Hasil yang didapat yaitu salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kinerja pemerintahan daerah di kabupaten Bangli adalah penerapan sistem informasi akuntansi. Faktor lainnya adalah sebagaimana yang dihasilkan oleh Mukmin dkk (2015). Penelitiannya yang menunjukkan tentang peningkatan kinerja SKPD di Kabupaten Aceh Tenggara yaitu pemahaman sistem akuntansi keuangan daerah dapat meningkatkan kinerja aparatur pada Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara. Faktor yang sama ditunjukkan oleh Sari dkk. Hasil yang didapat berbeda dengan peneliti sebelumnya yaitu pemahaman terhadap sistem informasi akuntansi tidak dapat memberikan peningkatan bagi kinerja pemerintah.

Berkaitan dengan sistem informasi keuangan yang diterapkan Seperti : sistem informasi penganggaran, sistem pelaporan keuangan daerah, serta sistem informasi yang berkaitan keuangan lainnya harus ditinjau kembali untuk menguji efektivitas, efisiensi dan relevansi sistem terhadap tugas-tugas operasional. Adebayo dalam Francis (2016) mengemukakan bahwa sistem akuntansi merupakan bagian penting dalam kehidupan suatu organisasi dan

perlu dievaluasi dalam konteks manajerial dan lingkungan yang lebih luas.

Berdasarkan latar belakang diatas serta penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dengan memperhatikan setiap faktor penentu keberhasilan sistem informasi keuangan daerah baik itu dari internal maupun eksternalnya dan merujuk resensi. Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ **Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Sistem Informasi Akuntansi di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Deli Serdang**”

1.2 Identifikasi Masalah

1. Bagaimana manajemen menanggapi sebuah masalah yang dihadapi ?
2. Apakah sistem informasi di pemerintah sudah handal ?
3. Bagaimana pengelolaan sistem informasi di pemerintah ?
4. Apakah Pemerintah sudah menerapkan akuntansi berbasis akrual ?
5. Apa yang dapat dijadikan tolak ukur dalam penilaian kinerja sistem informasi akuntansi ?
6. Bagaimana peranan sistem Informasi akuntansi di pemerintahan ?

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah diuraikan sebelumnya, agar ruang lingkup permasalahan yang diteliti terarah dan tidak meluas, maka peneliti membatasi penelitian ini pada masalah :

Keterlibatan pemakai dalam peroses pengembangan sistem informasi, kemampuan teknik personal, dukungan pimpinan bagian serta program pelatihan dan pendidikan pemakai, memiliki pengaruh terhadap kinerja sistem

informasi akuntansi pada pemerintah Kabupaten Deli serdang.

1.4 Perumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah yang telah di uraikan sebelumnya, maka dapat di rumuskan suatu masalah yang akan yang di teliti, yaitu :

1. Apakah keterlibatan pemakai dalam peroses pengembangan sistem informasi, memiliki pengaruh terhadap kinerja sistem informasi akuntansi pada pemerintah Kabupaten Deli Serdang ?
2. Apakah kemampuan teknik personal, memiliki pengaruh terhadap kinerja sistem informasi akuntansi pada pemerintah Deliserdang ?
3. Apakah dukungan pimpinan bagian, memiliki pengaruh terhadap kinerja sistem informasi akuntansi pada pemerintah Deli Serdang ?
4. Apakah program pelatihan dan pendidikan pemakai, memiliki pengaruh terhadap kinerja sistem informasi akuntansi pada pemerintah Deli Serdang ?
5. Apakah keterlibatan pemakai dalam proses pengembangan SI, kemampuan teknik personal, dukungan pimpinan bagian dan program pelatihan dan pendidikan pemakai, memiliki pengaruh terhadap kinerja sistem informasi akuntansi pada pemerintah Deli Serdang

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah yang akan di teliti maka tujuan penelitian ini untuk menguji: Apakah

1. Keterlibatan pemakai dalam peroses pengembangan sistem informasi memiliki pengaruh terhadap kinerja sistem informasi akuntansi pada

pemerintah Deli Serdang.

2. Kemampuan teknik personal memiliki pengaruh terhadap kinerja sistem informasi akuntansi pada pemerintah Deli Serdang.
3. Dukungan pimpinan bagian memiliki pengaruh terhadap kinerja sistem informasi akuntansi pada pemerintah Deli Serdang.
4. Program pelatihan dan pendidikan pemakai memiliki pengaruh terhadap kinerja sistem informasi akuntansi pada pemerintah Deli Serdang.
5. Keterlibatan pemakai dalam proses pengembangan SI, kemampuan teknik personal, dukungan pimpinan bagian dan program pelatihan dan pendidikan pemakai memiliki pengaruh terhadap kinerja sistem informasi akuntansi pada pemerintahan Deli Serdang

1.6 Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti dan Akademisi

Penelitian ini sebagai bahan masukan untuk menambah wawasan dan pengetahuan serta pemahaman bahwa kinerja sistem informasi akuntansi dipengaruhi oleh keterlibatan pemakai dalam proses pengembangan SI, kemampuan teknik personal dan program pelatihan dan pendidikan pemakai. Hasil ini dapat dijadikan tambahan referensi bagi peneliti selanjutnya, untuk menguji kembali mengenai pengaruh ketiga variabel tersebut dan variabel lain yang mampu berdampak terhadap kinerja SIA pada kondisi apapun, ataupun jenis organisasi yang berbeda.

2. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini memberikan informasi kepada Pimpinan bagian bahwa apabila Unit pemerintah ingin meningkatkan tata kelola keuangan dengan baik, unit pemerintah harus memperhatikan kinerja SIA yang dipengaruhi keterlibatan pemakai dalam proses pengembangan SI, kemampuan teknik personal dan program pelatihan dan pendidikan pemakai.